



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARDI SEPDIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **216280**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **1.670.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 3385 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **462.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V / AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT KENDARAAN PENUMPANG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **155.000.000**

D. SURAT BERTHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **280.000.000**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **2.567.000.000**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.567.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.